

## **MENILIK KEBIJAKAN *ANTI-DUMPING* SEBAGAI BENTUK TINDAKAN PROTEKSI (STUDI PUTUSAN WTO DS442 DAN KASUS SERUPA)**

Oleh: Pawestri Nindyatami<sup>1</sup> dan Linda Yanti Sulistiawati<sup>2</sup>

### **INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis i) kebijakan *anti-dumping* sebagai *trade remedies* dapat menjadi bentuk tindakan proteksi dalam putusan *World Trade Organization* (“WTO”) bagi negara anggota WTO guna menjamin prinsip perdagangan yang adil; dan ii) parameter kebijakan *anti-dumping* yang diterapkan khususnya dalam putusan WTO DS529 dan kasus serupa (DS442 dan DS491) yang disesuaikan dengan aturan *anti-dumping* yang berlaku dalam hukum internasional.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun sifat penelitian ini yaitu penelitian hukum deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur yang berangkat dari sumber hukum internasional serta jurnal, buku, dan artikel. Penulisan hukum lainnya yang relevan. Penelitian ini menitikberatkan pembahasannya pada analisis kebijakan *anti-dumping* dalam tiga kasus sengketa WTO, yaitu DS529, DS442, dan DS491.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa i) penyelesaian kasus *dumping* dalam putusan WTO DS529 dan kasus serupa telah sesuai dengan prosedur penyelesaian sebagaimana yang diatur di dalam *Anti-Dumping Agreement* (“ADA”), *Dispute Settlement Understanding* (“DSU”), dan peraturan WTO sehingga parameter kebijakan *anti-dumping* telah sesuai dengan aturan yang berlaku; dan ii) berdasarkan studi ketiga putusan tersebut, hadirnya tindakan *anti-dumping* yang tercantum dalam ADA telah menjadi bentuk tindakan proteksi bagi negara anggota WTO yang dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada negara dalam menjaga kepentingan ekonomi dan perdagangannya masing-masing.

**Kata Kunci:** *Anti-dumping*, WTO, Hukum Ekonomi Internasional

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Dosen Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

***SCRUTINIZING ANTI-DUMPING POLICY AS A FORM OF PROTECTION  
(A CASE STUDY OF WTO DECISION DS442 AND SIMILAR CASES)***

*By: Pawestri Nindyatami<sup>3</sup> and Linda Yanti Sulistiawati<sup>4</sup>*

***ABSTRACT***

*This research aims to find out and analyze i) anti-dumping policy as trade remedies can be a form of protective measures in the World Trade Organization (“WTO”) rulings for WTO member countries to ensure the principle of fair trade; and ii) the parameters of anti-dumping policy applied specifically in WTO ruling DS529 and similar cases (DS442 and DS491) which are adjusted to the applicable anti-dumping rules in international law.*

*The method used in this research is normative juridical which uses a statute approach and case approach. The nature of this research is descriptive legal research with data collection techniques through literature studies that depart from international legal sources as well as journals, books, and other relevant legal writing articles. This research focuses on the analysis of anti-dumping policy in three WTO dispute cases, including DS529, DS442, dan DS491.*

*The results show that i) the settlement of dumping cases in WTO ruling DS529 and similar cases have been in accordance with the settlement procedures as stipulated in the Anti-Dumping Agreement (“ADA”), Dispute Settlement Understanding (“DSU”), and WTO regulations so that the anti-dumping policy parameters are in accordance with the applicable rules; and ii) based on the study of the three rulings, the presence of anti-dumping measures contained in the ADA has become a form of protective measures for WTO member countries which are carried out by providing protection to countries in safeguarding their respective economic and trade interests.*

***Keywords: Anti-dumping, WTO, International Economic Law***

---

<sup>3</sup> Mahasiswa Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

<sup>4</sup> Dosen Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada